

SKRIPSI

**PERAN *NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION* SEBAGAI  
AKTOR DIPLOMASI BUDAYA INDONESIA  
(STUDI KASUS: PROGRAM KEBUDAYAAN *RUMATA' ARTSPACE*)**

Disusun dan diajukan oleh

SAFIRA DEVI AMORITA

E061171308



**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN *NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION* SEBAGAI  
AKTOR DIPLOMASI BUDAYA INDONESIA (STUDI KASUS :  
PROGRAM KEBUDAYAAN *RUMATA' ARTSPACE*)

N A M A : SAFIRA DEVI AMORITA

N I M : E061171308

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Makassar, 15 Januari 2021

Mengetahui :

Pembimbing I,

**Agussalim, S.IP, MIRAP**  
NIP. 197608182005011003

Pembimbing II,

**Bama Andika Putra, S.IP, MIR**  
NIK. 199112172018073001

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



**H. Darwis, MA., Ph.D.**  
NIP. 196201021990021003

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERAN *NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION* SEBAGAI  
AKTOR DIPLOMASI BUDAYA INDONESIA (STUDI KASUS :  
PROGRAM KEBUDAYAAN *RUMATA' ARTSPACE*)

N A M A : SAFIRA DEVI AMORITA

N I M : E061171308

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 13 Januari 2021.



Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Bama Andika Putra, S.IP, MIR

Anggota : 1. Drs. Aspiannor Masrie, M.Si

2. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safira Devi Amorita  
Nomor Induk : E061171308  
Program Studi : Departemen Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Peran *Non Governmental Organization* sebagai Aktor Diplomasi Budaya Indonesia

(Studi Kasus: Program Kebudayaan *Rumata 'Artspace'*)

Adalah karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Januari 2021



Safira Devi Amorita

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tak hentinya Penulis panjatkan kepada **Allah Subhanallahu Wa Ta'ala** atas segala rahmat dan karunia-Nya yang kemudian dapat mengantarkan Penulis dalam menyelesaikan studi serta penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Shalawat dan salam juga Penulis panjatkan kepada **Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam** yang telah menjadi sosok panutan terbaik bagi seluruh umat-Nya.

Skripsi ini juga dapat diselesaikan oleh Penulis berkat do'a, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti dari kedua orang tua Penulis, **Puguh Herumawan, ST.** dan **Wiwik Astuti, SH.** *Dad, thank you for always doing your best to support me in so many ways. Mom, thank you for always trusting me and being my number one best friend.* Ungkapan terima kasih tak akan cukup Penulis ucapkan untuk menyatakan betapa bersyukur Penulis atas semua yang telah *Daddy* dan *Mommy* berikan hingga Penulis sampai di titik ini. *All of this would not be possible without both of you.* "Seperti detak jantung yang bertaut, nyawaku nyala karena denganmu."

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang turut membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

1. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.**, beserta jajarannya.
2. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak **Prof. Dr. Armin, M.Si.**, para **Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**, serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. Kepada Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak **H. Darwis, MA., Ph.D.**, serta seluruh **dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional** yang telah membimbing Penulis semasa studi.
4. Kepada Dosen Pembimbing Penulis, Bapak **Agussalim S.IP., MIRAP** dan Kak **Bama Andika Putra, S.IP., MIR.**, yang telah banyak memberikan arahan, dukungan, kritik, dan saran kepada Penulis dalam proses penyusunan skripsi.
5. Kepada seluruh **staf dan pegawai Departemen Ilmu Hubungan Internasional**, khususnya **Ibu Rahma, Ibu Fatma, dan Ibu Tia**, yang juga telah banyak membantu dan mendukung Penulis semasa studi.
6. Kepada seluruh orang hebat di balik *Rumata' Artspace*, Kak **Lily Yulianti Farid**, Kak **Riri Riza**, Kak **Rachmat Hidayat Mustamin**, Kak **Winata Bavina**, Kak **Ifdhal Tawaqal Ibnu**, Kak **Abi Nurabdiansyah**, Kak **Pamula Mita Andary**, Kak **Fikri**, serta seluruh teman-teman *volunteer* hebat lainnya.
7. Terkhusus kepada Kak **Abdi Karya**, *I guess just a 'thank you' would not be enough*. Penulis memperoleh banyak sekali pengalaman dan cerita berharga karena dukungan, apresiasi, bimbingan, dan kepercayaan yang Kak Abdi berikan kepada Penulis sejak awal. Tidak hentinya pula Kak Abdi memberikan kesempatan baru kepada Penulis untuk kembali memperoleh pengalaman dan cerita berharga lainnya hingga hari ini. Kak Abdi, *thank you for your beautiful soul. I'm looking forward to learn more from you and grow together with you.*

8. Kepada sobat dahsyat yang bisa Penulis jadikan rumah untuk pulang, **Feren Mutiara Claudia, Hesti Indah Anggraeni, Audrey Maheswari,** dan **Sabilal Muhammad Faaris**. Fer, terima kasih untuk asupan konten harian yang tiada henti. Hez, terima kasih karena selalu siap untuk menemani kapan saja dibutuhkan. Odi, terima kasih untuk semangat kerja luar biasa yang memotivasi kita semua. Sabs, terima kasih karena masih mau menjadi bagian dari rumah kecil ini. *Thank you for the blood, sweat, and tears for the last seven years (and more to come!).*
9. Kepada **Dolby** yang selalu *all around you*, **Diazthama Al Insyirah Yuwono, Andi Nisrina Izlachi Atirah, Wardah Kharimah, Faizatul Khoiriah, Julia Hardianti Rusmin, Andi Muhammad Noor Rafli,** dan **Muhammad Firdaus Al Muntazar**. Tham, terima kasih untuk semua kebaikan yang tidak habis-habisnya diberikan. In, terima kasih karena sudah ikut berjuang dengan caramu sendiri. War, terima kasih untuk semua sesi antar-jemput yang penuh cerita. Jak, terima kasih untuk asupan *spilled tea*-nya. Uli, terima kasih karena masih betah *all around me* sejauh ini. Raf, terima kasih untuk semua *serotonin boost* di setiap hari yang penuh hahaha. Daus, terima kasih untuk pertemanan yang membuat kita sama-sama belajar. *Dolby, thank you for being the best older brothers and sisters that a hwanggeum maknae could ask for.*
10. Kepada seluruh teman angkatan **LIBERTÉ 2017**, khususnya teman-teman penghuni **Kelas Genap**, yang senantiasa menemani keseharian Penulis selama masa studi. Terima kasih untuk semua tawa dan tangis

(khususnya ketika mengejar *deadline*) yang dibagikan, untuk semua diskusi bermanfaat dan tidak bermanfaat, serta untuk semua dukungan dalam berbagai bentuk yang diberikan kepada Penulis. *You guys made me who I am today. I wish the best for every one of you.*

Pada akhirnya, Penulis juga berterima kasih kepada setiap orang yang telah membaca dan memanfaatkan skripsi ini sebaik mungkin. Penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini. Karenanya, Penulis mengharapkan berbagai bentuk umpan balik dari pembaca, baik dalam bentuk kritik maupun saran, untuk pengembangan diri Penulis ke depannya.

*Genius Lab*, Januari 2021

Penulis

## ABSTRAK

**Safira Devi Amorita, E061171308, dengan judul skripsi “Peran *Non Governmental Organization* sebagai Aktor Diplomasi Budaya Indonesia (Studi Kasus: Program Kebudayaan *Rumata’ Artspace*)” di bawah bimbingan Agussalim Burhanuddin, S.IP., MIRAP selaku Pembimbing I dan Bama Andika Putra, S.IP., M.IR. selaku Pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program-program kebudayaan *Rumata’ Artspace* yang termasuk praktik diplomasi budaya Indonesia serta untuk mengetahui peran *Rumata’ Artspace* sebagai aktor diplomasi budaya Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Ada pun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis adalah observasi dan kajian pustaka untuk mengumpulkan data sekunder dari artikel, berita, jurnal, dokumentasi program-program *Rumata’ Artspace*, dan publikasi program-program *Rumata’ Artspace*. Dalam menganalisis dan menyajikan data, Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yang disertai dengan teknik penulisan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program-program kebudayaan *Rumata’ Artspace* dapat dikategorikan sebagai upaya diplomasi budaya Indonesia karena memenuhi elemen-elemen utama dari diplomasi budaya, yaitu keterlibatan aktor, tujuan, kegiatan, dan audiens. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa *Rumata’ Artspace* adalah salah satu NGO yang mampu menjalankan perannya sebagai aktor diplomasi budaya Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh pengelolaan potensi dan sumber daya *Rumata’ Artspace* yang mampu memenuhi tiga strategi pelaksanaan diplomasi budaya, yaitu koneksi, konsistensi, dan inovasi.

Kata kunci: Diplomasi budaya, Indonesia, NGO, *Rumata’ Artspace*, Program kebudayaan

## ABSTRACT

**Safira Devi Amorita, E061171308, with “The Role of Non Governmental Organization as Indonesian Cultural Diplomacy Actor (Case Study: Rumata’ Artspace Cultural Program)” under the guidance of Agussalim Burhanuddin, S.IP., MIRAP as Supervisor I and Bama Andika Putra, S.IP., M.IR. as Supervisor II, in the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.**

This study aims to determine the implementation of Rumata’ Artspace cultural programs included as Indonesian cultural diplomacy practices and to determine the role of Rumata’ Artspace as Indonesian cultural diplomacy actor.

The research method used in this study is qualitative research type presented descriptively. The data collection techniques used by the author are observation and literature review to collect secondary data from articles, news, journals, documentation of Rumata’ Artspace programs, and publication of Rumata’ Artspace programs. In analyzing and presenting data, the author uses qualitative analysis techniques with deductive writing techniques.

The results of this study indicate that the Rumata’ Artspace cultural programs can be categorized as Indonesian cultural diplomacy practices because it fulfill the main elements of cultural diplomacy, namely the actors involvement, objectives, activities, and audiences. Apart from that, this research also shows that Rumata’ Artspace is one of the NGO that able to carry out its role as an actor of Indonesian cultural diplomacy. This is due to the management of Rumata’ Artspace’s potential and resources which are able to meet the three strategies of the implementation of cultural diplomacy, namely connection, consistency, and innovation.

Key words: Cultural diplomacy, Indonesia, NGO, Rumata’ Artspace, Cultural program

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Konsep .....	6
1. Diplomasi Budaya.....	6
2. Masyarakat Sipil ( <i>Civil Society</i> ) .....	9
E. Skema Pembahasan .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. <i>Non Governmental Organizations</i> (NGO) .....	18
B. Diplomasi Budaya .....	29
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DIPLOMASI BUDAYA</b>	
<b>INDONESIA DAN RUMATA' ARTSPACE.....</b>	<b>43</b>
A. Diplomasi Budaya Indonesia.....	43
B. <i>Rumata' Artspace</i> .....	50
<b>BAB IV PERAN <i>NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION</i> SEBAGAI</b>	
<b>AKTOR DIPLOMASI BUDAYA INDONESIA .....</b>	<b>58</b>

A. Program-Program Kebudayaan <i>Rumata' Artspace</i> sebagai Aktor Diplomasi Budaya Indonesia.....	58
1. <i>Makassar International Writers Festival</i> .....	59
2. <i>Makassar South East Asian Screen Academy</i> .....	68
3. <i>The Makassar-Yirrkala Artist Exchange Program</i> .....	74
4. <i>The United Kingdom-Indonesia Indigenous Poetry Exchange             Program</i> .....	83
B. Peran <i>Rumata' Artspace</i> sebagai Aktor Diplomasi Budaya Indonesia .	89
1. <i>Connection</i> (Koneksi).....	90
2. <i>Consistency</i> (Konsistensi) .....	92
3. <i>Innovation</i> (Inovasi) .....	94
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>98</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Pendekatan Taksonomi untuk NGO .....</b>	<b>23</b>
<b>Tabel 2. Aktor-Aktor dalam Pelaksanaan <i>Makassar International Writers Festival</i> .....</b>	<b>61</b>
<b>Tabel 3. Aktor-Aktor dalam Pelaksanaan <i>Makassar South East Asian Screen Academy</i> .....</b>	<b>70</b>
<b>Tabel 4. Aktor-Aktor dalam Pelaksanaan <i>The Makassar-Yirrkala Artist Exchange Program</i> .....</b>	<b>76</b>
<b>Tabel 5. Aktor-Aktor dalam Pelaksanaan <i>The United Kingdom-Indonesia Indigenous Poetry Exchange Program</i> .....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1. Struktur Organisasi <i>Rumata' Artspace</i> .....</b>	<b>52</b>
---	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan fenomena globalisasi saat ini turut menghadirkan berbagai perkembangan dalam kajian hubungan internasional. Perkembangan tersebut memengaruhi relasi antarnegara, termasuk dalam praktik diplomasi. Fenomena globalisasi menghadirkan sebuah metode baru dalam praktik diplomasi, yaitu diplomasi publik. Adapun perbedaan mendasar antara praktik diplomasi tradisional dan diplomasi publik dapat terlihat dengan jelas. Diplomasi tradisional menekankan praktik diplomasi pada hubungan perwakilan resmi antarnegara atau aktor internasional lainnya. Sedangkan, praktik diplomasi publik menargetkan masyarakat umum seperti organisasi dan kelompok non-pemerintah serta individu tertentu (Melissen, 2005, hal. 5).

Paul Sharp mendefinisikan diplomasi publik sebagai sebuah proses di mana terdapat hubungan langsung dengan orang-orang di suatu negara untuk memajukan kepentingan dan memperluas nilai-nilai dari mereka yang direpresentasikan (Sharp, 2005, hal. 106). Ada pun tujuan dari praktik diplomasi publik adalah untuk meningkatkan keakraban, meningkatkan apresiasi, merangkul masyarakat, dan memengaruhi sikap masyarakat terhadap suatu negara tertentu (Leonard, 2007). Diplomasi publik menjadi salah satu praktik diplomasi yang sering ditemukan di suatu kawasan yang memiliki tingkat interdependensi ekonomi dan/atau politik yang tinggi serta tingkat interkonektivitas masyarakat (*civil society*) yang tinggi (Melissen, 2005, hal. 11). Fenomena ini menunjukkan pentingnya unsur relasi

*people-to-people* dalam diplomasi publik. Unsur ini juga nampak dalam praktik diplomasi budaya sebagai salah satu bentuk dari diplomasi publik.

Diplomasi budaya mengutamakan nilai-nilai budaya suatu negara sebagai media diplomasi atau sebagai objek yang hendak diperkenalkan kepada negara lain dalam dunia internasional. Diplomasi budaya dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pertukaran gagasan, informasi, seni, dan aspek kebudayaan lainnya di antara negara-negara dan antarmasyarakat untuk menghadirkan kesepahaman bersama (Cummings, Jr., 2003). Melalui nilai-nilai budaya, suatu negara dapat menghadirkan kesan positif, menunjukkan kepentingan, mempromosikan pertukaran budaya, dan melahirkan bentuk kepercayaan sebagai landasan kerjasama yang berkelanjutan (Lee, 2015, hal. 2).

Praktik diplomasi budaya juga dikenal dengan istilah “diplomasi publik baru” (*new public diplomacy*) yang melibatkan aktor-aktor, tujuan, dan strategi yang lebih variatif dalam melaksanakan praktik diplomasi publik. Aktor-aktor baru ini disebut sebagai aktor non negara (*non state actors*) seperti *non governmental organization* (NGO), *intergovernmental organization* (IGO), perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional, media, bahkan individu-individu tertentu (Mellisen, 2005, hal. 5). Dengan mengedepankan relasi kebudayaan, praktik *new public diplomacy* ini kemudian lebih mengutamakan pendekatan dengan masyarakat dibanding sekedar pembentukan citra; mengutamakan pembentukan relasi yang stabil; mengutamakan kebutuhan jangka panjang dibanding kebutuhan jangka pendek; dan membangun kepercayaan satu sama lain (Melissen, 2005, hal. 21).

Melalui pendekatan relasi *people-to-people* yang mengedepankan unsur kebudayaan, NGO kemudian memiliki peran esensial dalam menjalankan praktik diplomasi budaya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, NGO dinilai mampu memperoleh dan mempertahankan reputasi baik. Ke-dua, NGO juga mampu memetakan isu tertentu dengan para ahli. Ke-tiga, NGO mampu terlibat dalam dialog dengan pemerintah dan publik. Ke-empat, NGO cenderung memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dapat memahami kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Ke-lima, NGO mampu menjalin jaringan kerja sama dengan berbagai mitra dan dapat mempertahankannya dengan baik (Pantoja, 2018).

Salah satu NGO di Indonesia yang turut melakukan praktik diplomasi budaya Indonesia adalah *Rumata' Artspace*. *Rumata' Artspace* adalah organisasi non pemerintah dalam bentuk rumah budaya yang berlokasi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah budaya ini telah bergerak secara independen sejak didirikan oleh Riri Riza dan Lili Yulianti Farid pada 18 Februari 2011. *Rumata' Artspace* menyediakan kesempatan dan ruang bagi para seniman untuk melakukan pertunjukan seni, memberikan pelatihan seni dan budaya, serta memperkenalkan berbagai bentuk kesenian dan kebudayaan Indonesia (Rumata' Artspace, 2017). Sejak tahun 2012, *Rumata' Artspace* memfasilitasi berbagai kegiatan seperti pameran kesenian, pemutaran film, pertunjukan musik dan teater, pembacaan karya sastra, serta berbagai diskusi yang mengarusutamakan gender dan budaya lokal (Makassar International Writers Festival, 2019).

Dalam berbagai kegiatannya, *Rumata' Artspace* memfasilitasi program-program pertukaran budaya, memfasilitasi program pertukaran mahasiswa asing

dan mahasiswa dalam negeri, melaksanakan program residensi seniman dan penulis di dalam negeri mau pun di luar negeri, serta menjadi penyelenggara (*host*) dari program-program internasional seperti *Makassar International Writers Festival* dan *Makassar South East Asia Screen Academy* (Rumata' Artspace, 2017). Melalui program-program tersebut, *Rumata' Artspace* bekerja sama dengan berbagai mitra luar negeri seperti *British Council*, *Japan Foundation*, *Hivos*, Konsulat Jenderal Australia di Indonesia, *the Australia-Indonesia Centre*, dan lain-lain.

Praktik diplomasi budaya masih sering diasosiasikan dengan pemerintah dan representasi resmi negara lainnya sebagai aktor pelaksana. Dalam lingkup pemahaman konvensional, praktik diplomasi budaya yang dilaksanakan oleh aktor negara bertujuan untuk memperoleh kepentingan nasional. Pemahaman ini kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan kajian hubungan internasional. Fenomena globalisasi menghadirkan ruang bagi aktor non negara untuk turut berperan dalam upaya diplomasi budaya melalui pendekatan relasi *people-to-people*. Pemaparan di atas kemudian mendorong Penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait peran NGO sebagai aktor diplomasi budaya Indonesia melalui program-program kebudayaan yang dilaksanakan oleh *Rumata' Artspace*.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan berfokus pada peran *Rumata' Artspace* sebagai salah satu NGO di Indonesia yang melakukan praktik diplomasi budaya. *Rumata' Artspace* berupaya untuk mendorong perkembangan kesenian dan kebudayaan Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia. Sehingga, penelitian ini akan berfokus pada

program-program kebudayaan yang dilaksanakan oleh *Rumata' Artspace* di kawasan timur Indonesia, khususnya Kota Makassar sebagai kota yang menjadi lokasi dari NGO ini. Ada pun beberapa program-program yang akan dipaparkan dalam penelitian ini yaitu *Makassar International Writers Festival*, *Makassar South East Asian Screen Academy*, *The Makassar-Yirrkala Artist Exchange Program*, dan *The United Kingdom-Indonesia Indigenous Poetry Exchange Program*. Program-program kebudayaan ini dipilih oleh Penulis karena pelaksanaan keempat program tersebut bersifat transnasional dengan melibatkan mitra kerja sama dari luar negeri. Program-program tersebut juga memuat berbagai unsur kebudayaan Indonesia yang diperkenalkan melalui kegiatan pertukaran, pameran, kerja sama, dan promosi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, Penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan program-program kebudayaan *Rumata' Artspace* yang termasuk praktik diplomasi budaya Indonesia?
2. Bagaimana peran *Rumata' Artspace* sebagai aktor diplomasi budaya Indonesia?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Ada pun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program-program kebudayaan *Rumata' Artspace* yang termasuk praktik diplomasi budaya Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran *Rumata' Artspace* sebagai aktor diplomasi budaya Indonesia.

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Salah satu sumbangsih dalam kajian ilmu hubungan internasional, khususnya terkait diplomasi budaya dan peran aktor non negara dalam hubungan internasional.
2. Salah satu referensi bagi pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan, khususnya dalam bidang diplomasi budaya.
3. Salah satu referensi bagi aktor non negara untuk melaksanakan upaya diplomasi budaya dengan mitra luar negeri.

#### **D. Kerangka Konsep**

##### **1. Diplomasi Budaya**

Diplomasi merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh negara untuk mempertahankan eksistensinya di dunia internasional. Perkembangan fenomena globalisasi menghadirkan bentuk baru dalam praktik diplomasi yaitu diplomasi publik. Diplomasi publik berfokus pada upaya diplomasi dengan pendekatan relasi *people-to-people*. Ada pun konsep *new public diplomacy* atau diplomasi publik baru menghadirkan aktor-aktor non negara sebagai pelaksana diplomasi publik. Diplomasi budaya merupakan salah satu bentuk dari diplomasi publik. Diplomasi budaya dapat diartikan sebagai sebuah proses pertukaran gagasan, informasi, seni,

dan aspek-aspek kebudayaan lainnya di antara negara-negara dan antarmasyarakat untuk menghadirkan kesepahaman bersama (Cummings, Jr., 2003).

Kebudayaan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pola tingkah laku manusia, termasuk dalam upaya untuk menjalin relasi yang melintasi batas-batas negara. Karenanya, diplomasi budaya dapat merujuk pada relasi langsung dan berkelanjutan antarmasyarakat dari berbagai negara yang dirancang untuk membantu menciptakan iklim kepercayaan dan pemahaman internasional yang lebih baik (Ma, 2015 hal. 395). Menurut Joseph Nye, baik praktik diplomasi publik mau pun praktik diplomasi budaya berfokus pada upaya pengembangan hubungan yang berkelanjutan antarpihak utama selama bertahun-tahun atau bahkan dekade melalui beasiswa, pertukaran, pelatihan, konferensi, seminar, dan akses ke media (Ma, 2015, hal. 395).

Istilah diplomasi budaya sering kali dikaitkan dengan relasi kebudayaan internasional, pertukaran budaya internasional, kerja sama budaya internasional, dan diplomasi publik. Sehingga, diplomasi budaya dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak dan bertujuan untuk mempererat relasi, meningkatkan kerja sama sosial dan kultural, serta untuk mencapai kepentingan nasional (Senkić, 2017, hal. 5). Menurut Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, upaya diplomasi budaya dapat dituangkan dalam berbagai kegiatan seperti melalui penetrasi (perdagangan), propaganda (kesenian), kompetisi, ekshibisi, negosiasi, dan pertukaran ahli (Warsito & Kartikasari, 2007). Berbagai bentuk kegiatan ini menunjukkan bahwa diplomasi budaya merupakan sebuah praktik diplomasi yang mengutamakan

interaksi antarmasyarakat dibanding interaksi politik antarnegara seperti konsep diplomasi pada umumnya (Lee, 2015, hal. 3).

Seni dan budaya menjadi pondasi dari diplomasi budaya karena dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait isu tertentu. Selain itu, seni dan budaya juga dapat mendorong dialog dan membangun kepercayaan antaraktor yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda (Senkić, 2017 hal. 5). Dengan perkembangan arus informasi dan komunikasi lintas negara, elemen pertukaran dan mutualitas turut menjadi landasan penting dalam konsep diplomasi budaya (Jora, 2013 hal. 3). Dahulu, kebijakan politik diyakini dapat menghadirkan ruang untuk pertukaran budaya. Namun saat ini, pertukaran budaya juga dapat menghadirkan kebijakan politik dan bahkan memengaruhi kebijakan yang sudah ada.

Perkembangan fenomena globalisasi juga memengaruhi konsep diplomasi budaya. Kini, praktik diplomasi budaya juga dapat dilaksanakan oleh berbagai aktor non negara seperti NGO, lembaga kesenian, pusat kebudayaan, institusi swasta, seniman, penulis, jurnalis, dan lain-lain. Peran aktor non negara dalam diplomasi budaya kemudian menjadi lebih signifikan. Para aktor non negara tersebut memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk berinteraksi dengan masyarakat melalui karya kesenian (Senkić, 2017). Selain itu, tren program-program diplomasi budaya saat ini merupakan bentuk respons dari berbagai isu sosial seperti rasisme, kesenjangan, diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan migran, perselisihan antarkelompok masyarakat, dan upaya resolusi konflik (Jora, 2013, hal. 6).

Dalam penelitian ini, konsep diplomasi budaya digunakan untuk menganalisa peran NGO sebagai aktor diplomasi budaya Indonesia. Ada pun peran NGO sebagai aktor diplomasi budaya Indonesia dapat ditinjau dari upaya pelaksanaan program kebudayaan transnasional yang bekerja sama dengan berbagai mitra luar negeri. Konsep ini digunakan oleh Penulis karena konsep ini dapat menjelaskan bagaimana pendekatan *people-to-people* dengan unsur seni dan budaya dapat menghadirkan *mutual understanding* antarpihak yang terlibat. Konsep diplomasi budaya memiliki empat elemen utama yaitu keterlibatan aktor (*actors involvement*), tujuan (*objectives*), aktivitas/kegiatan (*activities*), dan sasaran audiens (*audiences*) (Mark, 2009 hal. 7). Penulis akan menganalisa program-program kebudayaan *Rumata' Artspace* yang memuat elemen-elemen ini.

## **2. Masyarakat Sipil (*Civil Society*)**

Fenomena globalisasi yang terjadi saat ini memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Globalisasi juga mendorong konektivitas masyarakat meski berada di berbagai tempat yang berbeda. Situasi ini kemudian menjadikan masyarakat sipil sebagai salah satu aktor yang turut berperan dalam hubungan internasional. Istilah masyarakat sipil dapat merujuk pada seluruh pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan dan pasar (*market*) (Marchetti, 2016). Masyarakat sipil dapat diartikan sebagai berbagai organisasi non pemerintah dan organisasi non profit yang hadir di tengah-tengah masyarakat dan menunjukkan kepentingan dan nilai-nilai tertentu (WEF, 2013).

Organisasi tersebut dapat berlandaskan nilai dan prinsip etik, budaya, politik, ilmiah, kepercayaan/keagamaan, dan humanitarian. Ada pun organisasi masyarakat sipil memiliki berbagai macam bentuk seperti kelompok komunitas, organisasi non pemerintah, perserikatan buruh, kelompok adat, organisasi amal, kelompok kepercayaan/keagamaan, asosiasi para ahli, dan yayasan (WEF, 2013). Perkembangan teknologi, informasi, dan telekomunikasi mendorong hadirnya ruang bagi masyarakat sipil global (*global civil society*) untuk mengambil peran dalam dunia internasional. Konsep masyarakat sipil global muncul pada tahun 1990-an ketika terjadi transformasi sosial politik yang kemudian didefinisikan sebagai suatu interaksi transnasional yang tidak dibatasi oleh institusi pemerintah (Mitrani, 2013, hal. 174).

Konsep masyarakat sipil juga dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Pendekatan liberalisme memandang masyarakat sipil sebagai aktor yang berkontribusi secara *bottom-up* terhadap efektivitas dan legitimasi sistem internasional secara keseluruhan. Dari sudut pandang realisme, masyarakat sipil dipandang sebagai ‘alat’ yang digunakan oleh negara untuk mencapai kepentingannya, termasuk untuk mempromosikan gagasan dan nilai tertentu. Di sisi lain, pendekatan Marksisme memandang masyarakat sipil sebagai salah satu aktor yang dapat menentang ‘kekuatan-kekuatan’ besar dalam tatanan dunia (Marchetti, 2016). Meski demikian, berbagai perspektif tersebut memiliki sebuah kesamaan yaitu pandangan bahwa masyarakat sipil merupakan aktor non pemerintah yang juga dapat berperan dan memengaruhi dunia internasional.

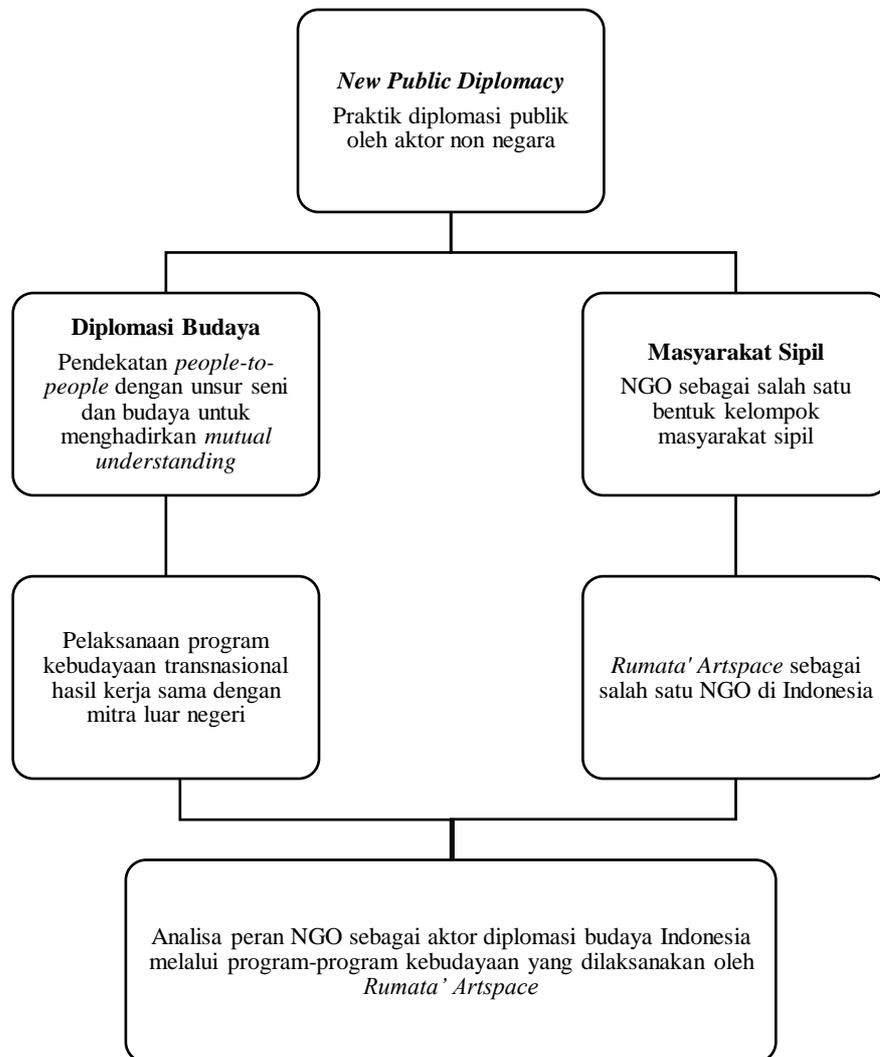
Selama beberapa dekade terakhir, konektivitas masyarakat sipil di skala nasional, regional, dan global bertumbuh dengan pesat. Konektivitas ini meningkatkan partisipasi dari masyarakat sipil dalam menanggapi isu tertentu secara kolektif. Ada pun ruang lingkup dari masyarakat sipil yaitu (WEF, 2013):

1. Organisasi non profit, *non governmental organizations* (NGOs), dan *civil society organizations* (CSOs) yang memiliki struktur serta kegiatan yang terorganisir dan biasanya merupakan entitas atau kelompok yang terdaftar.
2. Kelompok dan kegiatan daring termasuk komunitas di media sosial yang dapat “diorganisir”, namun tidak perlu memiliki struktur organisasi dan struktur finansial yang legal dan nyata.
3. Gerakan sosial dari suatu tindakan dan/atau identitas kolektif, baik dalam bentuk daring maupun luring.
4. Pemuka agama, komunitas kepercayaan/keagamaan, dan organisasi kepercayaan/keagamaan.
5. Perserikatan buruh dan organisasi buruh yang mewakili para pekerja.
6. Pengusaha sosial (*social entrepreneurs*) yang menerapkan pendekatan pasar yang berorientasi kepada masyarakat dan lingkungan.
7. Kelompok akar-rumput (*grassroots group*) dan kegiatan lain dalam skala lokal.
8. Koperasi yang dimiliki dan diatur oleh anggotanya secara demokratis.

Dalam penelitian ini, konsep masyarakat sipil digunakan untuk menganalisa peran NGO sebagai aktor diplomasi budaya Indonesia. Konsep ini juga dapat

menjelaskan bagaimana NGO, sebagai salah satu aktor non negara, dapat mengambil peran dalam dunia internasional. Penulis menggunakan konsep ini karena konsep masyarakat sipil dapat menjelaskan bagaimana *Rumata' Artspace* mengambil peran dalam upaya diplomasi budaya Indonesia sebagai salah satu NGO independen.

### E. Skema Pembahasan



Konsep *new public diplomacy* atau diplomasi publik baru hadir sebagai hasil perkembangan kajian ilmu hubungan internasional yang kemudian memberikan ruang dan kesempatan bagi aktor-aktor dan praktik-praktik diplomasi baru. Aktor-aktor baru tersebut dapat berupa aktor non negara yang kini memiliki peran yang lebih signifikan dalam hubungan internasional. Fenomena globalisasi kemudian mendorong masyarakat sipil, sebagai aktor non negara, untuk berperan dalam pelaksanaan praktik diplomasi publik. Konsep diplomasi publik baru juga menghadirkan strategi yang lebih variatif dalam pelaksanaan praktik diplomasi publik, seperti diplomasi budaya. Adapun diplomasi budaya merupakan salah satu bentuk diplomasi yang mengedepankan relasi *people-to-people* dengan unsur seni dan budaya untuk menghadirkan *mutual understanding*.

Berangkat dari konsep-konsep tersebut, penelitian ini selanjutnya akan menjabarkan bagaimana kelompok masyarakat sipil dapat berperan sebagai aktor diplomasi budaya. Dalam penelitian ini, batasan dari kelompok masyarakat sipil adalah organisasi non pemerintah atau *non governmental organization* (NGO) yang berada di Indonesia. Adapun NGO yang dianalisa dalam penelitian ini adalah *Rumata' Artspace*. Selain itu, praktik diplomasi budaya merujuk pada pelaksanaan program kebudayaan yang bersifat transnasional dan merupakan hasil kerja sama NGO dengan mitra luar negeri. Melalui penelitian ini, Penulis akan menjabarkan analisa terkait peran NGO sebagai aktor diplomasi budaya Indonesia melalui program-program kebudayaan yang dilaksanakan oleh *Rumata' Artspace*.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis serta tingkah laku yang dapat diamati dari objek penelitian (Taylor & Bogdan, 1984). Penulis memilih tipe penelitian kualitatif guna memperoleh hasil penelitian yang maksimum sebab objek penelitian tidak dapat diukur secara spesifik melalui perhitungan angka. Selain itu, Penulis juga menilai bahwa rangkaian penelitian ini memiliki ciri yang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Beberapa karakteristik khusus dari penelitian kualitatif antara lain yaitu, topik penelitian merupakan hal yang bersifat kompleks, sensitif, sulit diukur dengan angka, dan berhubungan erat dengan interaksi serta proses sosial; objek dan sasaran penelitian bersifat mikro dan berjumlah relatif sedikit; dan tujuan penelitian merupakan awal penelitian atau merupakan penelitian pendahuluan (Taylor & Bogdan, 1984).

Dalam melaksanakan penelitian, data penelitian merupakan salah satu instrumen terpenting guna memperoleh hasil akhir penelitian yang diharapkan. Sumber data penelitian dapat digolongkan menjadi data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lainnya seperti dokumen pendukung, jurnal, artikel berita, video, dan lain-lain (Sudarso, 2005). Ada pun jenis data penelitian dapat digolongkan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang disajikan dalam bentuk tulisan kata-kata seperti visi dan misi organisasi,

susunan kepengurusan organisasi, rencana kerja program, dan lain-lain. Sedangkan, data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur dan dihitung serta disajikan dalam bentuk bilangan dan angka, seperti jumlah pengeluaran, jumlah sarana dan prasarana, hasil perhitungan kuisioner, dan lain-lain (Sudarso, 2005).

Dalam penelitian ini, Penulis mengumpulkan data sekunder berupa rekam jejak program-program *Rumata' Artspace* yang termasuk dalam praktik diplomasi budaya Indonesia. Selain itu, Penulis juga mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari bacaan artikel dan jurnal terkait topik penelitian, dokumentasi program-program *Rumata' Artspace*, dan publikasi program-program *Rumata' Artspace* di media sosial. Ada pun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan tiga metode yaitu wawancara mendalam dan terbuka, observasi langsung, dan penelaahan terhadap dokumen tertulis (Oetomo, 2005). Dalam penelitian ini, Penulis akan mengumpulkan data sekunder melalui observasi langsung dan penelaahan terhadap dokumen tertulis.

Adapun observasi yang dilakukan oleh Penulis dapat dikategorikan sebagai *participant observation activity* atau kegiatan observasi partisipan. Observasi partisipan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pembelajaran (atau penelitian) melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan rutin dari objek yang diteliti (Kawulich, 2005). Ciri khusus dari teknik pengumpulan data ini adalah peneliti merupakan bagian dari lingkungan atau ruang lingkup penelitiannya. Tujuan dari observasi partisipan adalah untuk memperoleh pemahaman holistik dan mendalam terkait topik penelitian berdasarkan pengalaman serta data yang diperoleh peneliti.

Teknik pengumpulan data ini dipilih oleh Penulis karena Penulis merupakan salah satu relawan yang secara aktif mengikuti berbagai program *Rumata' Artspace*.

Bagian penting lain dari metode penelitian adalah teknik analisa data hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, terdapat tiga tahapan dalam menganalisa data hasil penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Milles & Huberman, 1992). Tahap reduksi data merujuk pada tahapan untuk menyederhanakan data ke dalam golongan-golongan tertentu. Tahapan ini diperlukan agar seorang peneliti dapat menentukan data yang dianggap relevan dan yang dianggap tidak relevan bagi penelitian. Tahap ke-dua yaitu penyajian data di mana seorang peneliti akan menyajikan data hasil reduksi ke dalam bentuk grafik, matriks, bagan, atau deskripsi dalam kalimat. Tahap terakhir dalam menganalisa data hasil penelitian adalah penarikan kesimpulan berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan. Dalam tahap ini, seorang peneliti sebaiknya melakukan verifikasi data hasil penelitian sebelum menarik kesimpulan akhir hasil penelitian (Milles & Huberman, 1992). Tahapan-tahapan ini lah yang digunakan oleh Penulis dalam menganalisa data dalam penelitian ini.

Penulis juga memuat suatu studi kasus di dalam penelitian ini. Studi kasus dalam sebuah penelitian merujuk pada serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut (Rahardjo, 2017). Sebuah studi kasus bersifat khusus dan unik, sehingga tidak dapat digeneralisir dengan studi kasus atau peristiwa lainnya. Dalam penelitian ini,

Penulis mengangkat sebuah studi kasus yaitu program kebudayaan *Rumata' Artspace*. Penulis kemudian menjabarkan secara mendalam terkait program kebudayaan *Rumata' Artspace* yang memiliki ciri yang khusus dan unik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. *Non Governmental Organization* (NGO)**

Menurut Perserikatan Asosiasi Internasional (*Union of International Associations*), terdapat tujuh aspek penting yang menjadi indikator kelayakan suatu organisasi atau kelompok yaitu tujuan, keanggotaan, struktur, pengurus, keuangan, relasi dengan organisasi lainnya, dan kegiatan (UIA, 2019). Perserikatan Asosiasi Internasional sendiri menetapkan lima belas model organisasi, salah satunya yaitu organisasi non pemerintah. John Clark menyimpulkan adanya enam tipe organisasi yaitu lembaga bantuan sosial, organisasi inovasi teknis, kontraktor layanan publik, lembaga pembangunan, organisasi pengembangan masyarakat, dan kelompok advokasi (Cheng, 2004, hal. 5). Pengelompokan ini kemudian menyebabkan pendefinisian organisasi non pemerintah menjadi lebih luas dan beragam.

Secara harfiah, organisasi non pemerintah atau *non governmental organization* (NGO) dapat diartikan sebagai aktor transnasional dan/atau pihak swasta yang melintasi batas-batas negara dan terdiri atas kelompok atau individu yang bukan representasi resmi dari pemerintah suatu negara (Cheng, 2004, hal. 3). Istilah NGO kemudian juga dapat diasosiasikan dengan istilah lain yang lebih familiar seperti asosiasi sukarela, asosiasi non profit, organisasi internasional non pemerintah, organisasi gerakan sosial baru, organisasi masyarakat, organisasi keanggotaan, organisasi akar-rumput, dan lain-lain (Cheng, 2004, hal. 4). Definisi lain menyatakan bahwa NGO adalah suatu kelompok masyarakat yang bersifat

sukarela dan non profit serta berada pada level lokal, nasional, dan internasional (Broś, 2017, hal. 14).

Kerstin Martens mendefinisikan NGO sebagai sebuah organisasi masyarakat yang independen dan formal (profesional) serta memiliki tujuan utama untuk mencapai tujuan bersama di tingkat nasional atau internasional (Cheng, 2004, hal. 7). Sir Geoffrey Wilson, selaku salah satu petinggi Oxfam di Inggris pada tahun 1981, menjelaskan bahwa sebagian besar NGO memiliki kepedulian terhadap pembangunan dan perkembangan pada isu agrikultur, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Menurut Sir Geoffrey Wilson, sebagian besar NGO dikelola dan dijalankan oleh orang-orang yang ahli terhadap bidang tertentu (Cheng, 2004, hal. 5).

Pada tahun 1944, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan NGO sebagai sebuah entitas non profit yang beranggotakan masyarakat sipil atau asosiasi masyarakat sipil dari suatu negara atau lebih di mana aktivitasnya ditentukan oleh kebutuhan kolektif anggotanya atau mitra kerjasamanya (Cheng, 2004, hal. 6). Istilah NGO kemudian secara resmi diakui sejak pelaksanaan *United Nations Conference on International Organization* di San Fransisco pada tahun 1945. Terdapat 1.200 organisasi masyarakat yang hadir dan turut membantu lahirnya *United Nations Charter* (Piagam PBB). Peran NGO di dunia internasional kemudian tertuang pada Pasal 71 dari Piagam PBB yang menyatakan bahwa Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dapat melakukan konsultasi dengan NGO yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan suatu isu tertentu (Cheng, 2004, hal. 6).

Definisi NGO juga dapat dikemukakan dari berbagai sudut pandang dalam kajian hubungan internasional. Sudut pandang liberalisme mengakui adanya NGO sebagai salah satu aktor hubungan internasional yang dapat menghadirkan berbagai relasi kerja sama antaraktor. Di sisi lain, sudut pandang realisme berfokus pada negara yang memiliki peran utama sebagai aktor dalam hubungan internasional. Menurut salah satu akademisi realisme, Kenneth Waltz, negara memang bukan satu-satunya aktor hubungan internasional. Namun, negara merupakan aktor utama yang memiliki peran terpenting dalam hubungan internasional dengan segala wewenang yang dimilikinya. Teori rezim dalam hubungan internasional memandang NGO sebagai salah satu aktor non negara yang dapat mendorong hadirnya bentuk-bentuk baru dalam rezim internasional karena NGO menganut tujuan dan nilai-nilai tertentu (Ahmed & Potter, 2006, hal. 11).

Sejak akhir Perang Dunia II, kehadiran organisasi masyarakat seperti organisasi non pemerintah dan organisasi internasional mengalami perkembangan. Pada awal tahun 1970-an, terjadi perkembangan yang signifikan pada jumlah organisasi baru dan jumlah kerja sama antarorganisasi. Kehadiran organisasi-organisasi tersebut kemudian dinilai efektif untuk memobilisasi masyarakat dan memengaruhi dunia internasional. Dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya, NGO cenderung bergerak atas persamaan tujuan dan kepentingan dari masyarakat sipil. Sehingga, NGO dapat berperan sebagai aktor humanitarian, mendorong perhatian masyarakat terhadap pemerintah, mengadvokasi kebutuhan masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat terkait kebijakan pemerintah melalui penyediaan informasi (Broś, 2017, hal. 14).

NGO memiliki berbagai jenis bentuk jika dilihat dari struktur organisasi, pendanaan, demografi, dan lain-lain. Berdasarkan struktur organisasi, NGO dapat dibedakan menjadi organisasi besar atau kecil, formal atau tidak formal, dan birokratis atau fleksibel. Sumber pendanaan NGO dapat berasal dari luar organisasi mau pun sumber daya sendiri. Berdasarkan letak geografis dan demografisnya, NGO terbagi atas “*Northern NGO*” yang berada di negara-negara maju dan “*Southern NGO*” yang berada di negara-negara berkembang. Selain itu, NGO juga dapat dibedakan berdasarkan jenis keanggotaannya, yaitu sukarelawan atau profesional dan ahli. Berdasarkan tujuannya, NGO terbagi menjadi NGO yang memenuhi kebutuhan mendesak (tujuan jangka pendek) atau NGO yang memberikan solusi dan pendekatan alternatif dalam menyelesaikan suatu isu tertentu (tujuan jangka panjang) (Lewis, 2010, hal. 2).

Peran NGO yang luas dapat dianalisa berdasarkan tiga komponen utama yaitu NGO sebagai pelaksana, katalisator, dan mitra (Lewis, 2007). NGO memiliki peran sebagai pelaksana mobilisasi sumber daya berupa penyediaan barang dan jasa kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Selain itu, NGO juga memiliki peran sebagai katalisator dimana NGO memiliki kemampuan untuk menginspirasi, memfasilitasi atau berkontribusi dalam upaya transformasi sosial. Ada pun peran NGO sebagai mitra menyoroti perkembangan cakupan mitra kerja NGO mulai dari komunitas masyarakat, pemerintah, pihak pendonor, dan sektor swasta (Lewis, 2010, hal. 1-2). Sejalan dengan ketiga komponen tersebut, NGO juga berperan sebagai pengamat dan inisiator dari berbagai gerakan sosial terkait isu-isu tertentu (Broś, 2017, hal. 14). NGO juga dapat membentuk opini publik yang kemudian

dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.

Isu-isu yang diangkat oleh NGO kini telah menjadi isu-isu transnasional seperti isu perubahan iklim, terorisme dan kejahatan terorganisir, polusi, kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Karenanya, NGO memiliki peran penting di tengah masyarakat sebagai kelompok penekan (*pressure groups*) yang bertugas untuk menyampaikan nilai-nilai tertentu. Menurut P. J. Simmons, NGO dapat berperan untuk memengaruhi pemerintah dan negara, lembaga multilateral, serta perusahaan nasional dan multinasional melalui empat tahap yaitu menetapkan agenda dan tujuan, menegosiasikan luaran kegiatan, merundingkan legitimasi, dan mengimplementasikan solusi (Cheng, 2004, hal. 8-9). Di dalam berbagai peristiwa di mana pemerintah dan sektor swasta tidak dapat menjalankan perannya, organisasi masyarakat sipil seperti NGO kemudian berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut (Sunga, 2005).

Menurut Shamima Ahmed dan David M. Potter dalam buku "*NGOs in International Politics*", kekuatan terbesar dari NGO adalah kemampuan persuasif atau membujuk. NGO dapat menunjukkan adanya pendekatan lain, yaitu pendekatan persuasi, untuk mengatur tatanan sosial selain pendekatan yang telah ada sebelumnya. Ada pun beberapa kegiatan yang umumnya dilakukan oleh NGO adalah edukasi publik, advokasi, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi di skala lokal, dan pengawasan atau pemantauan berbagai isu internasional. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak melibatkan unsur pemaksaan dan hanya mengutamakan komunikasi persuasif. Poin-poin ini menunjukkan bahwa

NGO beroperasi seolah-olah terdapat norma-norma konstitutif yang merupakan objek yang tepat untuk pelaksanaan politik internasional (Ahmed & Potter, 2006, hal. 15).

Secara singkat, identitas NGO dapat digambarkan dengan pendekatan taksonomi yang dipetakan oleh P. J. Simmons sebagai berikut:

**Tabel 1. Pendekatan Taksonomi untuk NGO**

<b>Tujuan</b>	<b>Keanggotaan</b>	<b>Pendanaan</b>	<b>Kegiatan</b>
Tujuan Utama: Mengubah norma sosial, meningkatkan <i>mutual understanding</i> , memengaruhi program, memengaruhi kebijakan, mengimplementasikan kebijakan, menyelesaikan masalah yang di mana tindakan pemerintah tidak memadai.	Anggota: Individu, organisasi, kuasi-pemerintah, sukarela, dll.	Sumber Dana: Iuran, donasi, yayasan, pemerintah (melalui hibah atau kontrak kerja), dan <i>intergovernmental organizations</i> (IGO).	Fungsi: Advokasi, penghimpunan dan analisa informasi, penyebaran informasi, memberi gagasan dan rekomendasi, peran penjagaan dan pengawasan, pelayanan, mediasi/fasilitasi, dan pemberi bantuan dana hibah.

<p>Kepentingan Siapa/Apa: Kepentingan publik, kepentingan kelompok atau institusi tertentu, kepentingan pihak</p>	<p>Skala geografis: Komunitas, subnasional, nasional, regional, dan transnasional.</p>		<p>Ruang Lingkup: Komunitas, subnasional, nasional, regional, dan internasional.</p>
<p>yang tidak terepresentasi (seperti generasi masa depan atau planet).</p>	<p>Personil: Sukarelawan, ahli dan profesional, undangan, terpilih, dan manajerial.</p>		<p>Target: Publik, konsumen, pemerintah, IGO, dan aktor non negara lain (termasuk NGO dan sektor swasta).</p>

(Sumber: Diolah dari Cheng, 2004, hal. 9.)

Pada era globalisasi saat ini, NGO memanfaatkan kemudahan konektivitas dengan maksimum untuk melaksanakan kerja sama dengan berbagai mitra, memperoleh dukungan publik, serta membangun kesepahaman dan kepercayaan bersama (Broś, 2017, hal. 15). Meski demikian, negara masih menjadi salah satu aktor dominan dalam dunia internasional. Kondisi ini kemudian mendorong NGO

untuk memengaruhi perilaku negara. Negara dapat menjadi mitra kerja sama NGO untuk bersaing dengan aktor lainnya guna mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki NGO. Namun di sisi lain, negara lebih sering menjadi sasaran utama dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan NGO (Spiro, 2010, hal. 224). Ada pun beberapa bentuk relasi NGO dengan aktor hubungan internasional lainnya yaitu relasi NGO – negara, relasi NGO – masyarakat sipil, relasi NGO – IGO, dan relasi NGO – NGO.

Berkembangnya perhatian masyarakat internasional terhadap diplomasi publik turut mendorong perkembangan partisipasi aktor non negara dalam melakukan diplomasi publik. Hal ini sejalan dengan konsep diplomasi publik baru, yang telah memberikan ruang bagi aktor non negara, seperti NGO, untuk melaksanakan praktik diplomasi publik. Dengan demikian, praktik diplomasi publik baru kini tidak hanya terbatas pada relasi antarpemerintah namun juga mencakup upaya membangun relasi antarmasyarakat sipil (Han & Yang, 2017). Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran konsep dan praktik diplomasi publik dari upaya mengelola dan mengendalikan pihak lain ke upaya mengembangkan hubungan dengan pihak tersebut (Fisher, 2010). Dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh NGO, berbagai NGO di seluruh dunia kemudian hadir sebagai aktor diplomasi budaya yang melaksanakan berbagai program kebudayaan.

Zhang dan Swartz mengidentifikasi empat alasan dari meningkatnya peran dan efektivitas dari NGO dalam praktik diplomasi publik (Zhang & Swartz, 2009):

1. NGO tidak lagi memercayai pemerintah untuk merepresentasikan kepentingan dan kekhawatiran mereka di ranah internasional.

2. Meningkatnya keinginan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan sebagai hasil dari meningkatnya pengertian tentang demokrasi.
3. Perkembangan teknologi saat ini memudahkan akses terhadap informasi secara global.
4. Gerakan global ditentukan oleh kekuatan ide, khususnya bagaimana ide-ide tersebut dapat disampaikan kepada publik.

Gagasan ini turut didukung oleh Olga Zatepillina-Monacell yang menyatakan bahwa NGO dapat menjadi aktor yang lebih unggul jika dibandingkan dengan aktor diplomasi publik lainnya karena NGO menyadari peran dan potensi yang mereka miliki di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, NGO memiliki pengalaman dan kemampuan untuk membangun relasi institusional dengan berbagai mitra kerja sama lainnya. Saat ini, tidak sedikit NGO yang menjalin kerja sama dan relasi transnasional. Kelebihan ini kemudian didukung dengan kemampuan NGO yang dapat mengelola dan menjaga reputasi organisasi mau pun reputasi negara asal mereka dengan baik. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, NGO juga dinilai mampu menjadi salah satu agen diplomatik yang efektif karena cenderung dipercaya oleh masyarakat di luar negeri (Zatepillina-Monacell, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, NGO dapat melakukan pendekatan relasi kebudayaan dalam perannya sebagai aktor diplomasi budaya. Ada pun beberapa contoh NGO yang berperan sebagai aktor diplomasi budaya yaitu:

1. *International Cultural Diversity Organization (ICDO)*. ICDO didirikan di Vienna, Austria oleh akademisi dan praktisi yang bersedia untuk

mengambil tindakan, menggunakan pengalaman mereka, dan menekan kesenjangan budaya melalui penelitian, lokakarya, acara, proyek sosial dan pembangunan. ICDO berupaya untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya keberagaman dan kesetaraan budaya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ICDO adalah edukasi, promosi, meningkatkan kesadaran, mendukung praktisi seni, mengawasi kebijakan pemerintah, mendorong pembangunan, serta melakukan riset terkait kebudayaan. Dalam melaksanakan berbagai programnya, ICDO menjalin kerja sama dengan berbagai mitra NGO, perusahaan swasta, bank, dan Kedutaan Besar Austria di berbagai negara (ICDO, n.d.).

2. *Cultural Heritage without Borders (CHWB)*. Yayasan *Cultural Heritage without Borders* berdiri sejak tahun 1995 sebagai bentuk respons dari Konvensi Den Haag 1954. NGO yang berbasis di Swedia ini bekerja secara independen untuk perlindungan kekayaan budaya jika terjadi konflik bersenjata, bencana alam, penelantaran, kemiskinan, atau konflik politik dan sosial. Ada pun misi dari CHWB adalah untuk mempromosikan warisan budaya sebagai hak dan sumber daya. Misi ini tertuang dalam berbagai program CWHB yang tersebar di berbagai negara lain seperti Albania, Belarus, Bosnia, Ethiopia, Kenya, Kosovo, Suriah, Tibet, Turki, dan negara-negara Eropa Tenggara lainnya. CHWB secara aktif mempromosikan kebebasan dan keberagaman budaya, ikut berkontribusi dalam upaya rekonsiliasi, bekerja sama dengan masyarakat sipil dan institusi lain di berbagai tingkatan, dan

berupaya untuk memperkuat peran museum di tengah masyarakat (CHWB, n.d.).

3. *The Saison Foundation*. *The Saison Foundation* adalah sebuah NGO dalam bentuk yayasan swasta pendonor atau pemberi dana hibah. Yayasan ini diinisiasi oleh Seiji Tsutsumi pada tanggal 13 Juli 1987. Tujuan dari berdirinya *The Saison Foundation* adalah untuk menciptakan nilai-nilai baru dan untuk meningkatkan kesepahaman bersama antarmasyarakat dengan mendukung kegiatan yang berkaitan dengan seni dan budaya. *The Saison Foundation* memberikan bantuan dana untuk kegiatan teater dan tarian kontemporer Jepang kepada seniman dan/atau institusi kesenian lainnya. Dana hibah yang diberikan oleh yayasan ini menyasar program-program kesenian dalam jangka waktu panjang dan berkelanjutan. Selain itu, *The Saison Foundation* juga dapat memfasilitasi ruang untuk seminar, diskusi, riset, *workshop*, konferensi, produksi, latihan, dan lain-lain di Studio Morishita yang bertempat di Tokyo, Jepang (Saison Foundation, 2000).

Penelitian ini selanjutnya akan memaparkan bagaimana peran NGO sebagai aktor diplomasi budaya. Penulis kemudian menggunakan definisi NGO yang ditetapkan oleh PBB di dalam penelitian ini, yang menyatakan bahwa NGO adalah sebuah entitas non profit yang beranggotakan masyarakat sipil atau asosiasi masyarakat sipil dari suatu negara atau lebih di mana aktivitasnya ditentukan oleh kebutuhan kolektif anggotanya atau mitra kerjasamanya (Cheng, 2004, hal. 6). Definisi ini sesuai dengan identitas *Rumata' Artspace* yang merupakan organisasi

independen yang bersifat non profit dan beranggotakan masyarakat sipil. Selain itu, *Rumata' Artspace* juga memiliki berbagai kegiatan yang ditentukan atas dasar kebutuhan kolektif anggota dan tujuan bersama. *Rumata' Artspace* juga menjalin kerja sama dengan berbagai mitra dalam melaksanakan berbagai kegiatannya, baik di dalam negeri mau pun di luar negeri.

## **B. Diplomasi Budaya**

Diplomasi merupakan salah satu unsur penting dalam kajian hubungan internasional. Istilah diplomasi sering dikaitkan dengan beberapa aktor yang memiliki wewenang sebagai representasi negara seperti duta besar, diplomat, konsuler, dan lain-lain. Definisi dari diplomasi sendiri sangat beragam. Secara umum, diplomasi dapat diartikan sebagai suatu cara, dengan peraturan dan tata krama tertentu, yang dilaksanakan oleh negara guna mencapai suatu kepentingan dalam hubungannya dengan negara lain atau dengan masyarakat internasional (Sinulingga, 2017, hal. 1). Diplomasi juga dapat diartikan sebagai sebuah instrumen dari implementasi kebijakan luar negeri dengan cara damai (Pajtinka, 2014, hal. 99).

Perkembangan kajian hubungan internasional yang mengikuti arus globalisasi menyebabkan pengertian diplomasi turut berkembang. Selain itu, institusi perwakilan resmi negara seperti kementerian luar negeri dan kedutaan besar juga kini melakukan pendekatan dengan masyarakat sipil dan individu. Perkembangan ini kemudian menghadirkan bentuk lain dari praktik diplomasi yaitu diplomasi publik. Diplomasi publik mengedepankan pendekatan *people-to-people*

sehingga memiliki jangkauan yang lebih luas. Selain diplomasi publik, ada pun bentuk lain dari praktik diplomasi adalah diplomasi kemanusiaan, diplomasi digital, diplomasi olahraga, diplomasi perdagangan, diplomasi keamanan, diplomasi kuliner, diplomasi kebudayaan, dan lain-lain (Cooper, Heine, & Thakur, 2013).

Menurut Nicholas J. Cull, terdapat lima elemen utama dalam pelaksanaan diplomasi publik (Cull, 2009, hal. 17), yaitu:

1. *Listening* atau mendengarkan. Sebelum melaksanakan praktik diplomasi publik, aktor diplomasi perlu mengumpulkan dan menyusun data tentang publik serta pendapat publik terkait isu tertentu. Data tersebut dapat digunakan untuk mengarahkan kebijakan dan pendekatan diplomasi publik yang akan digunakan. Dalam diplomasi publik, aktor diplomasi perlu lebih banyak mendengarkan masyarakat asing (*foreign audiences*) untuk mendorong hadirnya kesepahaman bersama (*mutual understanding*).
2. *Advocacy* atau advokasi. Advokasi dalam diplomasi publik merujuk pada upaya aktor diplomasi untuk mengelola lingkungan internasional dengan melakukan aktivitas komunikasi internasional. Advokasi dilakukan untuk secara aktif mempromosikan kebijakan, gagasan, atau kepentingan umum aktor diplomasi tersebut kepada masyarakat asing.
3. *Cultural diplomacy* atau diplomasi budaya. Elemen diplomasi budaya dapat diartikan sebagai upaya aktor diplomasi untuk membuat sumber daya budaya dan pencapaiannya diketahui di luar negeri. Diplomasi budaya juga dapat merujuk pada upaya aktor diplomasi untuk

memfasilitasi penyebaran budaya ke luar negeri. Secara konvensional, diplomasi budaya dilaksanakan oleh negara dan bertujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kini, diplomasi budaya juga dilaksanakan oleh organisasi non pemerintah yang menaruh perhatian pada bidang seni dan budaya.

4. *Exchange diplomacy* atau diplomasi pertukaran. Dalam lingkup diplomasi publik, kegiatan pertukaran merujuk pada upaya aktor diplomasi untuk melakukan pertukaran masyarakat antarnegara, baik untuk tujuan studi maupun tujuan akulturasi. Unsur timbal balik dalam kegiatan pertukaran mendorong hadirnya mutualitas dalam upaya diplomasi publik. Mutualitas yang dimaksud adalah di mana pihak-pihak yang terlibat dalam diplomasi publik dapat memperoleh keuntungan.
5. *International broadcasting* atau penyiaran internasional. Penyiaran (pemberitaan) internasional merujuk pada upaya aktor diplomasi untuk berinteraksi dengan masyarakat asing melalui pemanfaatan teknologi radio, televisi, dan internet. Secara historis, elemen paling kuat dari penyiaran internasional adalah penggunaan berita, terutama jika berita tersebut bersifat objektif.

Sebagai salah satu bentuk dari diplomasi publik, diplomasi budaya juga berperan untuk memengaruhi masyarakat asing. Diplomasi budaya dapat diartikan sebagai sebuah proses pertukaran gagasan, informasi, seni, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya di antara negara-negara dan antarmasyarakat untuk menghadirkan kesepahaman bersama (Cummings, Jr., 2003, hal. 1). Terdapat

definisi lain yang menyatakan bahwa diplomasi budaya merupakan sebuah presentasi internasional dari kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan pemahaman tentang kebudayaannya dan untuk menghasilkan citra yang menguntungkan bagi negara dalam upaya meningkatkan hubungan diplomatik dan relasi perdagangan (Mark, 2009, hal. 6). *The Institute for Cultural Diplomacy* mendefinisikan diplomasi kebudayaan sebagai serangkaian tindakan yang berdasar pada pertukaran gagasan, nilai, tradisi, dan aspek lain dari kebudayaan dan identitas budaya melalui relasi interkultural (Senkić, 2017, hal. 5).

Budaya merupakan kata kunci dari keseluruhan konsep diplomasi budaya. Belum ada penjelasan mutlak mengenai definisi ‘budaya’ karena berbagai pemahaman dan pendekatan yang beragam terkait budaya itu sendiri. Meski demikian, budaya sering kali dikaitkan dengan beberapa unsur seperti adat istiadat, tradisi, kehidupan masyarakat, sejarah, musik, seni dalam artian luas, gaya hidup, gestur, bahasa, kesusastran, dongeng, cerita rakyat, dan relasi sosial (Sztefka, 2008). Menurut *Universal Declaration on Cultural Diversity* yang ditetapkan oleh UNESCO, budaya adalah sebuah rangkaian nilai-nilai spiritual, material, intelektual, dan emosional yang beragam dalam masyarakat atau dalam suatu kelompok sosial yang meliputi kesenian, kesusastran, gaya hidup, cara hidup bersama, tradisi, dan kepercayaan (Pajtinka, 2014, hal. 99).

Secara tradisional, istilah budaya dalam konsep diplomasi budaya merujuk pada *high culture* seperti seni visual, sastra, teater, tarian, dan musik (Mark, 2009, hal. 5). Selain itu, istilah diplomasi budaya sering kali dikaitkan dengan relasi kebudayaan internasional, pertukaran budaya internasional, kerja sama budaya

internasional, dan diplomasi publik. Sehingga, diplomasi budaya dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak dari sektor publik, swasta, dan masyarakat umum untuk mempererat relasi, meningkatkan kerja sama sosial dan kultural, serta untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu (Senkić, 2017, hal. 5). Praktik diplomasi budaya merupakan sebuah praktik diplomasi yang mengutamakan interaksi antarmasyarakat (*people to people*) dibanding interaksi politik antarnegara seperti konsep diplomasi pada umumnya (Lee, 2015, hal. 3).

Menurut Matthew Isaac Cohen, diplomasi budaya merupakan praktik diplomasi yang melibatkan manajemen strategis dan penyebaran seni agar suatu negara atau aktor lainnya (seperti wilayah, organisasi antarpemerintah, atau organisasi non pemerintah) dapat memperoleh manfaat ekonomi atau politik dan memperkuat *soft power* di lingkungan internasional (Cohen, 2019). Karenanya, diplomasi budaya digolongkan sebagai salah satu instrumen *soft power* seperti yang dikemukakan oleh Joseph Nye. Berangkat dari definisi ini, praktik diplomasi budaya kemudian dapat dituangkan dalam bentuk pameran atau tur di luar negeri; pertukaran seniman; menyelenggarakan atau berpartisipasi dalam festival internasional, *biennale*, atau pameran; beasiswa atau *fellowship* untuk pelajar dan praktisi seni; dan menjadi sponsor untuk museum atau pusat budaya di luar negeri (Cohen, 2019).

Para ahli meyakini bahwa konsep diplomasi budaya telah dipraktikkan sejak periode Kekaisaran Roma. Pada saat itu, memperkenalkan bahasa Latin dan karya sastra Latin merupakan hal yang sama pentingnya dengan upaya menaklukkan wilayah. Pada masa Perang Dingin, baik Amerika Serikat mau pun Uni Soviet juga

memaksimalkan berbagai pendekatan kebudayaan untuk memengaruhi negara lain seperti melakukan pameran kebudayaan, membuat acara radio, dan pertukaran pelajar (Lee, 2015, hal. 3). Diplomasi kebudayaan kemudian menjadi instrumen penting dalam penyebaran ideologi pada masa Perang Dingin. Sementara itu, praktik diplomasi budaya modern awalnya dimulai sejak berdirinya *Alliance Française* pada tahun 1883. *Alliance Française* adalah sebuah NGO yang berfokus pada upaya memperkenalkan bahasa Perancis di negara lain (Pajtinka, 2014, hal. 97).

Praktik diplomasi budaya kemudian diyakini dapat menjadi *foundation of trust* (landasan kepercayaan) bagi aktor hubungan internasional. Diplomasi budaya juga dapat menjadi media untuk menyampaikan agenda kerja sama yang positif meski terdapat perbedaan pandangan mau pun kebijakan di antara aktor yang terlibat. Selain itu, diplomasi budaya juga dapat menjadi sebuah media netral yang mewadahi relasi *people-to-people* (Ien, Yudhishtir, & Phillip, 2015). Ada pun karakteristik paling penting dalam pelaksanaan praktik diplomasi budaya adalah adanya nilai (*values*) yang hendak disampaikan kepada publik (*environment*) (Schneider, 2003, hal. 4). Kedua karakteristik ini harus tertuang dalam berbagai praktik diplomasi budaya yang dilakukan oleh aktor yang terlibat.

Selain karakteristik, konsep diplomasi budaya juga memiliki beberapa elemen dasar yang menjadi landasannya. Elemen-elemen tersebut yaitu keterlibatan aktor (*actors involvement*), tujuan (*objectives*), aktivitas/kegiatan (*activities*), dan sasaran audiens (*audiences*) (Mark, 2009, hal. 7). Keterlibatan aktor dalam praktik diplomasi budaya dapat berasal dari pemerintah maupun non pemerintah, baik di

level internasional, nasional, mau pun sub nasional. Tujuan dari praktik diplomasi budaya sendiri terdiri atas tujuan idealistik dan tujuan objektif. Tujuan idealistik merupakan tujuan praktik diplomasi budaya untuk memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan tertentu. Selain itu, diplomasi budaya juga dapat memiliki tujuan objektif yaitu upaya untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Ada pun beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan berupa penetrasi (dalam bentuk perdagangan), propaganda (menyebarkan nilai-nilai tertentu melalui kesenian dan kebudayaan), kompetisi, pameran, negosiasi, dan pertukaran para ahli (Warsito & Kartikasari, 2007). Erik Pajtinka kemudian menguraikan praktik diplomasi budaya ke dalam enam bentuk kegiatan, yaitu (Pajtinka, 2014, hal. 103-105):

1. Membantu upaya penyebaran kebudayaan nasional dan identitas kebudayaan nasional.
2. Mempromosikan penyebaran bahasa nasional.
3. Mempromosikan dan menjelaskan nilai-nilai kebudayaan nasional.
4. Mempromosikan dan mendorong kerja sama kebudayaan antara pihak-pihak terkait.
5. Melakukan negosiasi perjanjian internasional terkait kerja sama kebudayaan.
6. Memberikan dukungan dan mempertahankan relasi dengan komunitas diaspora.

Elemen dasar terakhir dari diplomasi budaya adalah hadirnya publik yang menjadi target utama dari bentuk diplomasi ini. Target publik dari praktik diplomasi

budaya dapat berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Keempat elemen dasar tersebut kemudian dapat menjadi tolak ukur pelaksanaan praktik diplomasi budaya. Meski demikian, pelaksanaan praktik diplomasi budaya tidak dapat dipetakan dalam suatu panduan tertentu saja. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan praktik diplomasi budaya yang cenderung bersifat fleksibel dan dinamis. Praktik diplomasi budaya dapat memiliki banyak variasi sesuai dengan sumber daya budaya yang tersedia untuk aktor tertentu, serta tujuan dan sasaran aktor tersebut di tempat tertentu pada waktu tertentu (Goff, 2013, hal. 13).

Patricia M. Goff kemudian memetakan tiga strategi pelaksanaan diplomasi budaya, yaitu (Goff, 2013, hal. 13-15):

1. *Connection* atau koneksi. Menjalin koneksi dan memperkuat relasi menjadi hal penting dalam pelaksanaan diplomasi budaya guna menghadirkan kesepahaman bersama antaraktor yang terlibat. Karenanya, aktor diplomasi budaya harus mengenal dengan baik identitas budaya negara yang ia representasikan (*home country*) dan negara tujuan pelaksanaan diplomasi budaya (*host country*). Misalnya, para aktor dapat mencari kesamaan identitas antara *home country* dan *host country* agar dapat menerapkan pendekatan yang tepat dalam pelaksanaan diplomasi budaya. Para aktor diplomasi budaya juga memiliki tugas untuk mempertahankan koneksi dan relasi yang baik satu sama lain.
2. *Consistency* atau konsistensi. Ketika relasi antarnegara sedang mengalami ketegangan, diplomasi budaya dapat menjadi salah satu jalur

diplomasi yang tepat karena menysasar masyarakat daripada pemerintah suatu negara. Komitmen para aktor dalam melaksanakan praktik diplomasi budaya secara konsisten kemudian dibutuhkan. Hal ini tentunya bertujuan untuk mendorong keberlanjutan pelaksanaan diplomasi budaya. Selain itu, konsistensi diperlukan agar hasil dari pelaksanaan diplomasi budaya dapat diperoleh dengan maksimum.

3. *Innovation* atau inovasi. Pelaksanaan diplomasi budaya dapat memuat berbagai unsur kebudayaan seperti bahasa, pendidikan, dan kesenian. Meski demikian, pelaksanaan diplomasi budaya harus mengikuti arus perkembangan zaman. Diplomasi budaya yang bersifat dinamis dapat dilaksanakan dengan menghadirkan berbagai inovasi yang harus disesuaikan dengan aktor yang terlibat, tujuan yang hendak dicapai, dan teknologi yang tersedia. Karenanya, para aktor diplomasi budaya tidak dapat hanya bergantung pada metode-metode lama yang sudah tidak relevan dengan situasi terkini.

Menurut Mark Leonard, praktik diplomasi budaya memiliki empat tujuan, khususnya pada abad ke-21. Tujuan pertama yaitu untuk meningkatkan keakraban antarmasyarakat transnasional. Selain itu, praktik diplomasi budaya bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat asing (*foreign people*) terhadap kesenian dan kebudayaan suatu negara. Ada pun tujuan ke-tiga adalah untuk merangkul masyarakat transnasional, sehingga perpindahan komoditas barang dan jasa dapat terlaksana dengan lebih mudah. Tujuan ke-empat yaitu untuk memengaruhi sikap dan persepsi masyarakat asing terhadap suatu negara tertentu (Leonard, 2007).

Tujuan-tujuan ini menekankan pendekatan relasi antarmasyarakat melalui seni dan budaya. Seni dan budaya menjadi pondasi dari diplomasi budaya karena dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait isu tertentu. Selain itu, seni dan budaya juga dapat mendorong dialog dan membangun kepercayaan antaraktor yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda (Senkić, 2017, hal. 6).

Menurut *Council on Promoting of Public Diplomacy*, konsep diplomasi budaya memiliki tiga prinsip, yaitu penyebaran (*transmission*), penerimaan (*acceptance*), dan koeksistensi (*coexistence*). Prinsip penyebaran merujuk pada upaya aktor diplomasi untuk merepresentasikan identitas kebudayaan negara asalnya. Ada pun identitas kebudayaan dapat berupa bahasa, kuliner, gaya hidup, adat istiadat, pariwisata, dan potensi suatu negara. Prinsip penerimaan merujuk pada bentuk evaluasi dari kegiatan diplomasi budaya yang telah dilaksanakan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui pencapaian dari upaya diplomasi budaya. Selain itu, prinsip koeksistensi merujuk pada bagaimana upaya diplomasi budaya dapat dilaksanakan oleh aktor diplomasi melalui pendekatan yang damai meski terdapat perbedaan dengan sasaran audiens (Khatrunada & Alam, 2019, hal. 110-111).

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh *European Union National Institutes for Culture* (EUNIC), terdapat tiga pendekatan utama dalam pelaksanaan praktik diplomasi budaya, yaitu pendekatan diplomasi publik, pendekatan komunikasi strategis, dan pendekatan relasi kebudayaan. Pendekatan diplomasi publik sebagian besar dilakukan oleh pemerintah yang hendak mencapai

kepentingan nasional. Di sisi lain, pemerintah tidak terlalu banyak mengambil peran dalam pendekatan komunikasi strategis. Namun unsur-unsurnya masih nampak, misalnya kepentingan, pendanaan, strategi, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan relasi kebudayaan merujuk pada upaya diplomasi yang melibatkan dialog dan kolaborasi antarpihak yang terlibat. Tujuan utama pendekatan ini bukan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan, melainkan untuk memengaruhi sikap dan perilaku (EUNIC, 2016).

Untuk memaksimalkan dampak dari praktik diplomasi budaya, Cynthia P. Schneider menjabarkan beberapa poin penting yang perlu dipahami terkait pelaksanaan diplomasi budaya. Diplomasi budaya merupakan bentuk komunikasi dua arah yang berkelanjutan dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, diplomasi budaya perlu memuat karakteristik khusus yang membedakannya dari praktik diplomasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, diplomasi budaya harus dikemas secara kreatif, fleksibel, dan oportunistik. Diplomasi budaya bukan lah sebuah praktik yang dapat diukur secara kuantitatif karena mencakup relasi sosial antarmasyarakat. Pendekatan diplomasi budaya juga harus menyesuaikan dengan sasaran audiens agar menghadirkan kesan yang lebih familiar dan ramah. Di akhir penjelasannya, Cynthia P. Schneider menyampaikan bahwa diplomasi budaya dapat menjadi salah satu jalur yang dapat ditempuh apabila terjadi ketegangan dan tensi yang tinggi dalam hubungan diplomatik antarnegara (Schneider, 2006, hal. 196).

Sedangkan menurut *CPD Annual Research Conference Report*, terdapat lima poin utama yang dapat mendukung keberhasilan praktik diplomasi budaya yaitu (USC, 2014, hal. 12-13):

1. Menetapkan Identitas dengan Tepat. Sebelum melaksanakan praktik diplomasi budaya, para aktor (pemerintah, organisasi, atau seniman) harus memahami sepenuhnya identitas budaya dari negara yang akan diwakili. Selain itu, masyarakat saat ini dapat memiliki akses yang mudah terhadap informasi tentang suatu negara. Oleh karena itu, diplomasi budaya sepatutnya tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga perlu dikemas dengan cara yang menarik, unik, dan melambungkan prioritas budaya negara.
2. Pemetaan *Bottom-Up*. Dalam melaksanakan praktik diplomasi budaya, para aktor juga perlu memahami budaya dari target audiens. Hal ini tentunya dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat mendukung pelaksanaan diplomasi budaya. Jika tahap ini tidak dilakukan, praktik diplomasi budaya dapat disalahartikan menjadi sebuah upaya imperialisme budaya.
3. Strategi Taktis. Praktik diplomasi budaya yang efektif dapat dicapai dengan penyampaian narasi budaya melalui strategi taktis. Hal ini dapat dicapai melalui program pertukaran budaya internasional dan ikut berpartisipasi aktif dalam promosi tradisi budaya. Teknologi memungkinkan siapa saja untuk belajar tentang budaya negara lain secara mandiri, tetapi nilai tambah diplomasi budaya membantu

mengubah informasi ini menjadi pengalaman yang nyata dan transformatif.

4. Membangun Hubungan. Agar praktik diplomasi budaya dapat terlaksana dengan baik, para aktor harus memprioritaskan pembangunan hubungan antaraktor yang terlibat. Pendekatan ini dapat membuat diplomasi budaya bersifat lebih 'manusiawi'.
5. Keterlibatan Diaspora. Warga negara yang tinggal di luar negeri (atau diaspora) merupakan salah satu sumber daya yang penting dan dapat menjadi aktor diplomasi budaya. Diaspora (dan komunitas diaspora) dapat diberdayakan sebagai representasi non-propaganda dari negara asalnya.

Penelitian ini selanjutnya akan memaparkan bagaimana peran NGO sebagai aktor diplomasi budaya. Penulis kemudian menggunakan definisi diplomasi budaya oleh Milton Cummings, Jr. di dalam penelitian ini, yang menyatakan bahwa diplomasi budaya merupakan sebuah proses pertukaran gagasan, informasi, seni, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya di antara negara-negara dan antarmasyarakat untuk menghadirkan kesepahaman bersama (Cummings, Jr., 2003, hal. 1). Penelitian ini selanjutnya akan menjabarkan dan menganalisa peran *Rumata' Artspace* sebagai aktor diplomasi budaya menggunakan strategi pelaksanaan diplomasi budaya yang ditetapkan oleh Patricia M. Goff, yaitu koneksi, konsistensi, dan inovasi (Goff, 2013, hal. 13-15).

Dalam penelitian ini, program kebudayaan merujuk pada pengelompokan kegiatan diplomasi budaya oleh Matthew Isaac Cohen, yaitu berupa pameran atau

tur di luar negeri; pertukaran seniman; menyelenggarakan atau berpartisipasi dalam festival internasional, *biennale*, atau pameran; beasiswa atau *fellowship* untuk pelajar dan praktisi seni; dan menjadi sponsor untuk museum atau pusat budaya di luar negeri (Cohen, 2019). Adapun istilah ‘budaya’ merujuk pada definisi budaya oleh UNESCO, yaitu sebuah rangkaian nilai-nilai spiritual, material, intelektual, dan emosional yang beragam dalam masyarakat atau dalam suatu kelompok sosial yang meliputi kesenian, kesusastraan, gaya hidup, cara hidup bersama, tradisi, dan kepercayaan (Pajtinka, 2014, hal. 99).

Penelitian ini selanjutnya akan menjabarkan dan menganalisa program-program kebudayaan *Rumata’ Artspace*, yaitu *Makassar International Writers Festival*, *Makassar South East Asian Screen Academy*, *The Makassar-Yirrkala Artist Exchange Program*, dan *The United Kingdom-Indonesia Indigenous Poetry Exchange Program*. Program-program tersebut memuat unsur budaya berupa kesusastraan, seni rupa, dan seni pertunjukan dalam bentuk kegiatan pertukaran, pameran, kerja sama, dan promosi. Penulis kemudian menganalisa pelaksanaan keempat program kebudayaan tersebut menggunakan empat elemen diplomasi budaya yang ditetapkan oleh Simon Mark, yaitu keterlibatan aktor (*actors involvement*), tujuan (*objectives*), aktivitas/kegiatan (*activities*), dan sasaran audiens (*audiences*) (Mark, 2009, hal. 7).